

BAB I

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

Teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian dalam memahami setiap variable yaitu *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa, berikut teori dari ke tiga variabel sebagai berikut

1.1.1 *Good Governance*

1.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2018:23) mengungkapkan bahwa *Good governance* adalah:

“Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Sedangkan menurut Leny Nofianti (2014:52) mengungkapkan bahwa *Good governance* adalah :

“Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.”

Dari beberapa definisi diatas Rizal Djalil (2014:395) juga menyatakan bahwa *Good governance* diartikan sebagai berikut :

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

1.1.1.2 Indikator *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2014:5) indikator *Good Governance* adalah : Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator diatas:

1. Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
2. Transparansi (*transparency*) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.
3. Akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder

pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

4. Efektivitas (*effectiveness*) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
5. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.

Berdasarkan Indikator-indikator yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *Good Governance* adalah Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*).

1.1.2 Sistem Pengendalian Internal

1.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Wakhyudi (2018:18) Pengendalian Internal adalah

“Proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.”

Menurut Hery (2014:66) Pengendalian Internal adalah

“Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum / undang –undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”

Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal adalah sebuah aturan yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk di patuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan

1.1.2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal adalah

“Struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”

Menurut Mahmudi (2016:251) juga mengungkapkan Sistem pengendalian Intern adalah

“Proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaran nya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Kemudian IAPI dalam Agoes Sukrisno (2012:100) menyatakan definisi sistem pengendalian internal adalah:

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a)keandalan pelaporan keuangan, (b)efektivitas dan efisiensi operasi, (c)kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian Sistem Pengendalian Internal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah sebuah Proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaran nya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

1.1.2.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2016:21) indikator Sistem Pengendalian Internal adalah Lingkungan Pengendalian, Penentuan resiko, Pengendalian Aktivitas, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator diatas

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan ke san yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.

2. Penaksiran risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas Pengendalian

aktivitas pengendalian mencakup tindakan tindakan yang melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

4. Informasi dan komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iterative dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Pemantauan

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iterative dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi

Berdasarkan Indikator-indikator yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator Lingkungan Pengendalian, Penentuan resiko, Pengendalian Aktivitas, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan

1.1.3 Kinerja Pengelolaan Dana Desa

1.1.3.1 Pengertian Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018:160) Kinerja pemerintahan merupakan sebagai berikut:

“Suatu kegiatan yang tidak dapat dinilai hanya dari sisi output yang dihasilkan saja tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanannya.”

Selanjutnya Mahsun dkk (2018:141) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan sebagai berikut:

“Suatu prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok, serta gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran atau tujuan organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi.”

Selanjutnya Munti dan Fahlevi (2017) menyatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan sebagai berikut

“Kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”

Kemudian Rahman dan Rahcman (2021) berpendapat Kinerja Pengelolaan keuangan adalah:

“Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan.”

Sedangkan M Muslih (2020) menyatakan bahwa kinerja pengelolaan dana desa adalah capaian input, output, outcome, benefit, dan impact pengelolaan dana desa (M Muslih, 2020)

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dilakukan sekelompok orang secara bersama sesuai dengan tanggungjawab dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tidak hanya hasil tapi juga harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama

1.1.3.2 Indikator Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Mardiasmo, 2009: 1933). Indikator kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dapat diukur dengan konsep *value for money* “*Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu

a. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan Value For Money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

d. Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan

Berdasarkan Indikator-indikator yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator ekonomis, efektivitas, efisiensi dan pelaporan yang memadai

1.2 Kerangka Pemikiran

1.2.1 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Menurut Hutapea & Widyaningsih (2017) menyatakan bahwa pengaruh *good governance* terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu

contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isuisu krusial yang terjadi dimasyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah”.

Menurut Kurniawan (2005:12) mengenai Penerapan *good governance* adalah sebagai berikut

“Penerapan *good governance* yang baik tentu pengelolaan keuangan desa terkait dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa akan baik pula sesuai dengan tujuan dan cita - cita yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil”

BAPPENAS (2007: 3) bahwa salah satu pengaruh dari penerapan *good governance* adalah terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Berdasarkan penelitian Yuli Budiati, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Asih Niati (2019), menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Kemudian berdasarkan penelitian Maulina Agustiningtih, Taufeni Taufik, Novita Indrawati (2020) menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh pada pengelolaan dana desa

Lalu berdasarkan penelitian Santi Septiana, Suwardi Bambang Hermanto (2021) menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan

1.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

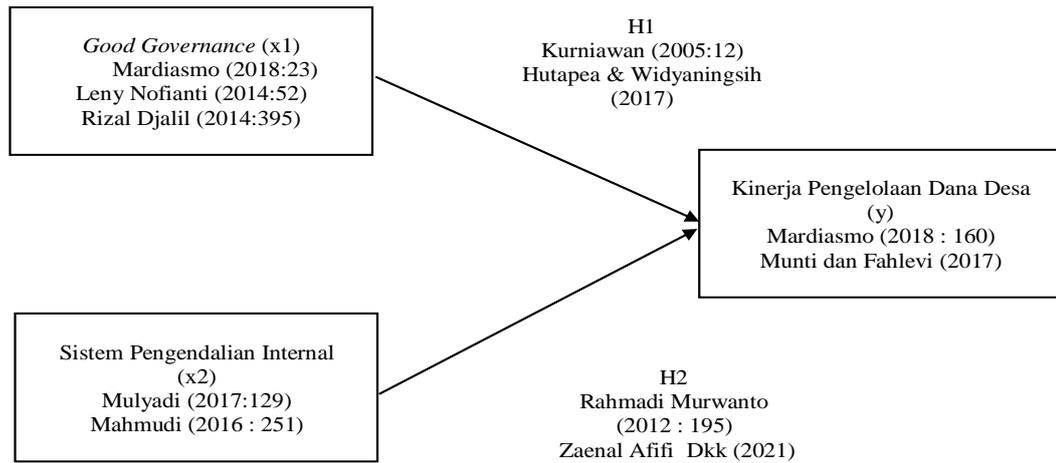
Menurut Rahmadi Murwanto (2012 : 195) mengungkapkan bahwa pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja yaitu :

“Sistem pengendalian merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi yang terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu kinerja”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zaenal Afifi, Mulyanto Mulyanto, Dennyca Hendriyanto Nugroho (2021) menyatakan bahwa *internal control system had a significant positive effect on the accountability of village fund management*. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dodik Slamet Pujiono Hari Sukarno Novi Puspitasari (2016) mengatakan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan dari peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyajikan paradigma penelitian dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

1.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:39) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H_1 : *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

H_2 : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Keuangan.